

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan perekonomian yang semakin berkembang ditandai dengan bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat dan diwujudkan dalam kenaikan pendapatan nasional (Rachman, 2018). Dalam kurun waktu tertentu, produksi suatu wilayah dapat diukur melalui nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. Nilai tambah ini secara keseluruhan dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Perkembangan ekonomi secara umum dapat dilihat melalui perubahan PDB dari satu periode ke periode lainnya. Data PDB dianalisis untuk melihat kinerja perekonomian mengalami peningkatan atau penurunan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu (BPS Jateng, 2024). PDRB dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi merupakan jumlah nilai tambah bruto (NTB) dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah tertentu pada satu periode waktu tertentu. Dengan metode ini dapat diketahui gambaran PDRB dari sisi penawaran. Pendekatan pendapatan ialah

penjumlahan dari balas jasa faktor-faktor produksi yaitu upah/gaji, surplus usaha, penyusutan/amortisasi, dan pajak di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan pengeluaran meliputi penjumlahan semua komponen pengeluaran akhir seperti konsumsi rumah tangga dan swasta, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor netto. Metode pengeluaran mencerminkan PDRB dari sisi permintaan.

Pada umumnya, PDRB disajikan dalam dua terminologi harga yang berbeda yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah dalam periode waktu tertentu menurut harga yang berlaku pada waktu tersebut. Penghitungan ini akan memberikan gambaran struktur ekonomi wilayah pada tahun tersebut. Sementara PDRB ADHK adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHK menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun sebagai refleksi capaian pembangunan daerah tanpa melibatkan unsur kenaikan atau penurunan harga yang berlaku. Tahun dasar yang digunakan BPS Indonesia hingga saat ini adalah tahun 2010 (BPS Indonesia, 2024). Penerapan tahun dasar 2010 dilakukan sesuai dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *System of National Accounts 2008* (SNA 2008). BPS Jawa Tengah (2004) menyatakan bahwa SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional mengenai cara pengukuran aktivitas ekonomi. BPS telah melakukan perubahan tahun dasar sebanyak lima kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena perekonomian Indonesia dinilai relatif stabil dan terjadi perubahan

struktur ekonomi terutama di bidang informasi dan teknologi yang berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya produk baru (BPS Jateng, 2024).

PDRB merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk merumuskan perencanaan kebijakan dalam pembangunan, menentukan arah pembangunan, serta mengevaluasi hasil pembangunan di wilayah tersebut. Dengan kata lain, PDRB menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Keberhasilan ini juga sangat bergantung pada potensi yang dimiliki oleh setiap daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, masing-masing wilayah akan fokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan yang dapat mendorong pembangunan ekonomi daerahnya (Nurbianto dalam Ferdiansyah, 2022).

Kemajuan ekonomi di suatu wilayah dapat dinilai berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus terhadap kondisi ekonomi wilayahnya karena hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, struktur ekonomi daerah terdiri dari 17 sektor usaha yang memiliki karakteristik yang beragam. Ke-17 sektor tersebut secara keseluruhan akan berkontribusi dalam pembentukan nilai PDRB wilayah tersebut.

2.1.2. Teori Ekonomi Regional

Ekonomi regional merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang fokus kajiannya terletak pada perbedaan karakteristik dan potensi antarwilayah. Dalam studi ini, analisis dilakukan terhadap suatu wilayah secara menyeluruh maupun perbandingan antar wilayah, dengan tujuan untuk memahami keragaman

potensi yang dimiliki dan merumuskan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata di berbagai daerah (Prisyarsono & Sahara, 2007). Ilmu ekonomi regional memiliki dua jenis manfaat utama, yakni pada skala makro dan mikro. Dalam skala makro, ilmu ini bermanfaat bagi pemerintah pusat dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Sementara itu, dari sisi mikro, ekonomi regional berperan dalam membantu para perencana wilayah untuk lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya bagi pelaksanaan suatu kegiatan atau proyek pembangunan suatu daerah.

Edgar M. Hoover (Chandra dalam Prisyarsono & Sahara, 2007) mengadopsi pendekatan dari teori ekonomi umum dalam menjelaskan potensi ekonomi wilayah dengan konsep-konsep teori ekonomi makro seperti nilai tambah dan analisis input-output yang kemudian diterapkan pada konteks ekonomi wilayah. Selanjutnya, ia memperluas pembahasan dengan teori-teori yang lebih spesifik dalam ranah ekonomi regional, seperti analisis *shift-share* dan teori basis ekspor. Ekonomi pembangunan membahas aktivitas ekonomi yang berlangsung di seluruh wilayah suatu negara. Sebaliknya, ekonomi regional berfokus pada kajian di wilayah tertentu dalam suatu negara. Dengan demikian, cakupan ekonomi pembangunan terbatas pada batas-batas nasional, sedangkan ekonomi regional dapat mencakup area yang lebih kecil dari sebuah negara ataupun lintas negara, selama wilayah tersebut dipandang sebagai satu kesatuan dalam analisis.

Ilmu ekonomi pembangunan umumnya membahas berbagai teori dasar murni (*positive science*), sementara ekonomi regional lebih menekankan pada penerapan konsep melalui rumus-rumus aplikatif (*normative science*). Perbedaan ini wajar mengingat ekonomi regional berkembang sebagai respons terhadap

kebutuhan nyata dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah. Tidak jarang, praktik di lapangan lebih dahulu dilakukan, kemudian dicari dasar teoritis atau pendekatan yang mendasarinya. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi regional cenderung berorientasi pada kebijakan (*policy oriented*).

2.1.3. Sektor Basis dan Potensi Unggulan Daerah

Dalam konteks ekonomi regional, dinamika pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dianalisis melalui kinerja masing-masing sektor ekonominya. Suatu sektor dapat digolongkan sebagai sektor basis apabila mampu mencukupi kebutuhan masyarakat lokal sekaligus menghasilkan surplus yang dapat dipasarkan ke wilayah lain (Pribadi, 2021). Sebaliknya, sektor nonbasis hanya melayani permintaan dalam daerah tanpa berorientasi ekspor. Karena kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sektor basis sering kali diposisikan sebagai sektor unggulan. Analisis terhadap sektor basis ini juga dapat dijadikan indikator untuk mengukur potensi ekspor suatu daerah serta memperkirakan dampaknya terhadap perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya (Soepono dalam Pribadi, 2021).

Sektor basis memiliki peranan penting sebagai penggerak utama dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Ketika suatu daerah mampu meningkatkan volume ekspor atau menyediakan pasokan ekonomi ke wilayah lain, maka hal tersebut dapat mendorong kemajuan pembangunan di daerah tersebut (Ridwan dalam Pribadi, 2021). Keberadaan sektor basis ini juga dapat memicu perkembangan sektor-sektor nonbasis, yang pada gilirannya berpotensi untuk tumbuh menjadi sektor basis baru. Dengan demikian, sektor basis memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan sektor nonbasis dalam

perekonomian daerah. Jika sektor ekonomi unggulan tersebut dapat dimaksimalkan pengelolaannya, sektor ini berpotensi menjadi sektor strategis yang dapat menopang pembangunan ekonomi di wilayah terkait.

Konsep sektor unggulan pada hakikatnya berkaitan dengan perbandingan antara satu wilayah dengan wilayah lain, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional. Di tingkat nasional, suatu sektor dapat disebut unggulan apabila sektor tersebut mampu menunjukkan daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor sejenis di daerah lain, sehingga mampu mendorong kegiatan ekspor (Silalahi dalam Rachman, 2018). Secara umum, sektor unggulan memiliki prospek pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah.

Sambodo menyatakan bahwa salah satu ciri sektor yang memiliki keunggulan adalah sektor tersebut mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Firman dalam Soebagiyo & Hascaryo, 2015). Sektor unggulan dapat diartikan sebagai sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor lainnya, baik melalui penyediaan bahan baku maupun sebagai pengguna hasil produksi sektor lain dalam proses industrinya. Potensi unggulan suatu daerah merujuk pada kekayaan atau sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut dan dapat dikembangkan menjadi produk khas daerah. Potensi ini bisa berasal dari sumber daya alam maupun kualitas sumber daya manusia yang memiliki nilai jual tinggi, mampu bersaing, dan berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Secara keseluruhan, potensi unggulan ini mencerminkan kapasitas daerah dalam memproduksi barang atau jasa, menciptakan nilai ekonomi, mengelola sumber daya secara efektif, membuka peluang kerja,

meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, serta memiliki prospek yang menjanjikan dalam hal produktivitas dan investasi.

Penetapan sektor unggulan di suatu daerah dapat menjadi landasan strategis bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pengembangan dan prioritas pembangunan sektor ekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang disusun akan lebih tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Identifikasi sektor yang memiliki keunggulan potensial dapat membantu pemerintah untuk merancang kebijakan ekonomi yang lebih terarah dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah tersebut (Rini, 2020). Sektor potensi unggulan akan mengembangkan daerah untuk ke depannya.

Menurut Rachbini (2001) dalam Kementerian Investasi (2022), terdapat empat syarat suatu sektor tertentu dapat menjadi sektor prioritas, yaitu:

1. Sektor yang dimaksud idealnya memproduksi barang atau jasa dengan tingkat permintaan yang tinggi, sehingga pertumbuhannya dapat meningkat secara signifikan akibat dorongan dari sisi permintaan pasar tersebut.
2. Adanya inovasi dan penerapan teknologi yang bersifat kreatif mengakibatkan pergeseran fungsi produksi menuju efisiensi yang lebih tinggi, serta mendorong ekspansi kapasitas produksi.
3. Sektor prioritas ini perlu menunjukkan kecenderungan adanya reinvestasi dari hasil produksinya, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah, sebagai bentuk kesinambungan pembangunan ekonomi.

4. Pertumbuhan sektor tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif dan saling menguatkan terhadap perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Setiap daerah memiliki sumber daya yang berpotensi untuk dikembangkan secara maksimal karena secara alami menyimpan keunggulan komparatif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara efektif dalam pembangunan ekonomi daerah, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi dan mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki daerah tersebut. Ketika pemerintah daerah mampu mengenali serta mengoptimalkan potensi tersebut, maka upaya peningkatan perekonomian lokal dapat berlangsung lebih cepat dan terarah.

2.1.4. Perencanaan Pembangunan Daerah

Krisis ekonomi global yang terjadi pada dekade 1930-an, dikenal sebagai Depresi Besar (*The Great Depression*), menjadi titik penting yang mendorong lahirnya pemikiran ekonomi dari John Maynard Keynes. Gagasan Keynes muncul sebagai respons terhadap kegagalan teori ekonomi klasik dalam menjawab persoalan-persoalan fundamental pada masa itu, khususnya terkait tingginya tingkat pengangguran. Situasi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak mampu mengatasi ketidakseimbangan ekonomi secara mandiri, sehingga intervensi pemerintah melalui kebijakan ekonomi menjadi hal yang mendesak. Ciri utama dari pemikiran Keynes terletak pada pentingnya peran aktif pemerintah dalam mengatur pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, teori ekonomi yang sebelumnya dominan, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith dan para ekonom klasik lainnya, mulai kehilangan relevansinya karena tidak mampu menjelaskan realitas

pengangguran massal dan kegagalan pasar bebas yang terjadi di banyak negara Barat akibat krisis tersebut.

Dalam buku *The General Theory of Employment*, Keynes menitikberatkan pada peran penting permintaan agregat dalam perekonomian, termasuk perlunya campur tangan aktif dari pemerintah (Kuncoro, 2018). Gagasan ini menawarkan jalan tengah antara sistem perencanaan terpusat dan mekanisme pasar bebas. Pendekatan makro ekonomi Keynes memberikan alternatif kebijakan yang berbeda dari teori Klasik dan terbukti efektif dalam merespons krisis ekonomi besar pada masanya. Pengaruhnya pun cukup besar dan bertahan cukup lama. Sejak tahun 1950 hingga pertengahan 1960-an, ajaran Keynes mendominasi pemikiran dan pendidikan ekonomi makro, yang banyak dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh seperti Alvin Hansen, Sir John Hicks, dan Paul Samuelson yang kemudian dikenal sebagai kelompok Neo-Keynesian.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan spesialisasi dan pemanfaatan teknologi, diperlukan keberadaan sistem hukum yang efektif serta regulasi yang jelas. Hal ini menegaskan pentingnya peran pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk menegakkan aturan, dalam hal ini adalah negara. Pemerintah tidak cukup hanya berperan sebagai fasilitator transaksi dan pelindung hak kepemilikan, tetapi juga harus menjadi penjamin stabilitas dan kepastian hukum. Tanpa jaminan atas keberlangsungan negara serta keamanan masyarakat dan aset yang mereka miliki, perencanaan masa depan menjadi sulit diwujudkan. Artinya, keputusan-keputusan penting dalam bidang investasi, inovasi, dan riset yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi tidak akan berlangsung secara optimal jika kondisi keamanan tidak terjaga. Oleh karena itu, pemerintah memiliki

tiga fungsi utama: (1) menjaga masyarakat dari ancaman kekerasan baik dari dalam maupun luar negeri; (2) menjamin perlindungan hak-hak setiap individu dari potensi ketidakadilan antarwarga; (3) menyediakan serta memelihara layanan dan institusi publik yang tidak dapat secara efisien dikelola oleh individu atau kelompok kecil.

Perencanaan ekonomi merupakan suatu proses yang dilakukan pemerintah secara sistematis guna mengatur serta menyelaraskan berbagai keputusan ekonomi dalam jangka waktu panjang. Langkah ini bertujuan untuk memberikan arahan, mempengaruhi, atau mengendalikan dinamika pertumbuhan sejumlah indikator ekonomi penting seperti pendapatan, konsumsi, kesempatan kerja, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan lainnya. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya. Rencana ekonomi dapat disusun secara menyeluruh (*comprehensive plan*) yang mencakup seluruh sektor ekonomi nasional, maupun secara parsial (*partial plan*) yang hanya berfokus pada beberapa sektor perekonomian tertentu.

Perencanaan ekonomi bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Konsep ini pertama kali diterapkan di Uni Soviet pada tahun 1928. Setelah Perang Dunia, pendekatan ini mulai diadopsi oleh berbagai negara karena memiliki prinsip dasar yang luas dan mudah diterapkan. Conyers & Hills mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus, di mana pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai alternatif dalam pemanfaatan sumber daya demi mencapai tujuan tertentu di masa mendatang (Kuncoro, 2018). Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa perencanaan memiliki empat unsur utama, yaitu: (1)

perencanaan melibatkan proses pemilihan; (2) perencanaan berfungsi sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber daya; (3) perencanaan menjadi instrumen dalam pencapaian tujuan; dan (4) perencanaan berorientasi pada masa yang akan datang.

Sejak tahun 2000, program pembangunan jangka menengah yang sebelumnya dikenal dengan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) dan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) pada masa pemerintahan Soeharto mengalami perubahan menjadi Program Pembangunan Nasional (Propenas), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Di tingkat daerah, program serupa yang sebelumnya dinamakan Repelitada diubah menjadi Program Pembangunan Daerah (Propeda) sebagai dokumen perencanaan dan Pola Dasar (Poldas) sebagai dokumen induk. Perubahan sistem perencanaan semakin diperkuat sejak tahun 2004 dengan diterapkannya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Mulai saat itu, istilah GBHN, Propenas, Propeda, Poldas, dan Repelitada tidak lagi digunakan dan digantikan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tingkat nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tingkat daerah yang mencakup periode selama lima tahun. Sementara itu, rencana pembangunan tahunan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tingkat daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan suatu rangkaian prosedur perencanaan pembangunan terpadu yang bertujuan menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka panjang,

menengah, hingga tahunan. Proses ini melibatkan berbagai elemen penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah (UU RI, 2004). Adapun tujuan dari penyusunan SPPN meliputi:

- (a) Memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan.
- (b) Memastikan integrasi, sinkronisasi, serta sinergi antar wilayah, ruang, waktu, fungsi pemerintahan, dan antara pemerintah pusat dengan daerah.
- (c) Menjamin kesinambungan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan.
- (d) Mendorong partisipasi aktif dari masyarakat.
- (e) Menjamin pemanfaatan sumber daya secara optimal yang efisien, efektif, adil, serta berkelanjutan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), terdapat empat pendekatan utama dalam proses perencanaan pembangunan yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, yaitu:

1. Proses Politik: merupakan proses pemilihan presiden maupun kepala daerah dianggap sebagai bagian dari perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan masyarakat dalam memilih calon berdasarkan visi dan misi pembangunan yang mereka tawarkan.
2. Proses Teknokratik: yakni perencanaan yang dilakukan oleh para ahli atau lembaga yang memiliki tugas khusus dalam bidang perencanaan,

dengan memanfaatkan metode serta kerangka pikir yang bersifat ilmiah.

3. Proses Partisipatif: yaitu suatu bentuk perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, melalui forum-forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
4. Proses *Top-Down* dan *Bottom-Up*: menunjukkan alur proses perencanaan berdasarkan tingkatan pemerintahan, baik dimulai dari pemerintah pusat ke daerah maupun sebaliknya.

Perencanaan pembangunan nasional di Indonesia dibedakan berdasarkan jangka waktu pelaksanaannya, yaitu: (1) rencana pembangunan jangka panjang dengan rentang waktu 20 tahun; (2) rencana pembangunan jangka menengah selama 5 tahun; dan (3) rencana pembangunan jangka pendek tahunan yang diwujudkan dalam RAPBN. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan bentuk konkret dari amanat yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang dirumuskan melalui visi, misi, serta arah pembangunan nasional. RPJPN menjadi landasan filosofis yang menggambarkan arah dan tujuan pembangunan dalam kurun waktu dua dekade. Pelaksanaan RPJPN dibagi menjadi beberapa tahapan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan, di mana setiap tahap memiliki tema pembangunan yang berbeda, disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai pemerintah pada periode tersebut. Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memuat visi, misi, dan program kerja presiden yang mengacu pada RPJPN. RPJMN mencakup strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program prioritas kementerian/lembaga

dan antar-kementerian, serta kebijakan pembangunan wilayah. Di samping itu, RPJMN juga memuat kerangka ekonomi makro, termasuk arah kebijakan fiskal. Untuk mendukung pelaksanaan rencana tersebut, pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. APBN dan dokumen pelengkapannya, termasuk nota keuangan, menjadi bentuk konkret dari perencanaan tahunan yang mengintegrasikan rencana jangka menengah dan jangka panjang dalam pelaksanaannya (Kuncoro, 2018).

2.1.5. RPJMD Kabupaten Klaten 2021 – 2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 8 Tahun 2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak 2021 sampai dengan 2026. Dokumen ini menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah.

Isu strategis yang menjadi masalah pembangunan mendasar Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2026 dalam RPJMD sebagai berikut:

1. **Kesejahteraan dan Kualitas Hidup**

Kesejahteraan dan kualitas hidup berkaitan erat dengan masalah sosial, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, pengangguran, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, akses disabilitas, dan pemberdayaan pemuda. Tujuan akhir peningkatan ini adalah untuk mengurangi kemiskinan. Dapat dilihat pada tabel 2.1, dengan adanya pandemi Covid-19, persentase penduduk miskin dan pengangguran naik

signifikan pada tahun 2020 dan 2021. Akan tetapi, ketika pasca pandemi mulai berangsur membaik ditandai dengan penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun dari tahun ke tahun dimulai pada tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 2.1. Persentase Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka 2018-2024 di Kabupaten Klaten

Tahun	Penduduk Miskin (%)	TPT (%)
2018	12,96	3,11
2019	12,28	3,55
2020	12,89	5,46
2021	13,49	5,48
2022	12,33	4,31
2023	12,28	4,20
2024	12.04	3,97

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Peningkatan pelayanan kesehatan diejawantahkan dalam bentuk sarana/fasilitas kesehatan, penyediaan obat dan pendukung medis, ketersediaan tenaga medis, jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dalam rangka pemulihan pandemi Covid-19. Pemerataan kualitas pendidikan juga perlu ditingkatkan dalam hal tenaga pendidik yang berkompeten, sarana & prasarana pendidikan yang berkualitas, penggunaan teknologi dalam pembelajaran serta ketersediaan jaringan infrastruktur pendukungnya. Harapannya, akan meningkatkan SDM yang berkualitas, kreatif, dan inovatif sehingga memiliki jiwa kemandirian yang tinggi.

2. Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP), dan Antisipasi Dampak Pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta.

Infrastruktur dan konektivitas wilayah adalah pengelompokan isu permasalahan yang berasal dari permasalahan terkait pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman. Isu tata ruang di Kabupaten Klaten lebih mengutamakan konsep tata ruang untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah utara, tengah, dan selatan. Diharapkan dengan adanya rencana struktur ruang kabupaten dapat menumbuhkan pusat-pusat kegiatan di wilayah utara dan selatan akan pemeratakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten baik dari segi fisik, ekonomi, maupun sosial. Sedangkan dengan adanya rencana pola ruang akan dapat mengarahkan lokasi pembangunan sesuai dengan daya dukung lingkungan.

3. Kondusivitas Wilayah

Permasalahan terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah masih tingginya tingkat pelanggaran K3 maupun pelanggaran perda. Dilansir dari soloraya.solopos.com, kecelakaan lalu lintas, salah satu pelanggaran K3, di Klaten mencapai 1.157 kejadian dalam kurun Januari – Desember 2021. Jumlah tersebut naik drastis dibandingkan angka kecelakaan sepanjang 2020. Dalam artikel yang dimuat satpolpp-damkar.klaten.go.id, pemasangan banner dan spanduk tanpa izin di sepanjang jalan termasuk ke dalam salah satu contoh pelanggaran Perda.

Hal ini diatur dalam Perda Kab. Klaten No. 12 Th. 2013; No. 1 Th. 2022; No. 5 Th. 2018; dan No. 68 Th. 2022.

Maka, perlu kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan menaati peraturan, di samping perlu adanya personil untuk pelaksanaan penertiban, pengawasan, dan penegakan perda untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Peningkatan nilai-nilai sosial budaya dan kehidupan beragama yang saling toleransi menjadi bagian penting dalam peningkatan kondusivitas wilayah dan kerukunan antar masyarakat di Kabupaten Klaten.

4. Tata Kelola Pemerintahan, Klaten *Smart City*, dan Inovasi Daerah
Isu strategis berikutnya adalah pelayanan publik belum seluruhnya terakses dengan mudah, peningkatan akuntabilitas kinerja, penggunaan sistem data dan informasi belum terintegrasi. Klaten *Smart City* berkaitan dengan permasalahan pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi dan informatika, persandian, kearsipan dan pelayanan umum. Perwujudan Klaten *Smart City* bertujuan untuk membangun keterbukaan data dan informasi yang mudah diakses bagi masyarakat yang membutuhkan, serta membangun masyarakat yang cerdas dan tanggap terhadap globalisasi.

5. Daya Saing Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Kontribusi sektor perdagangan, pariwisata, industri dan UMKM saat ini cenderung mengalami penurunan, terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19. Diperlukan upaya-upaya inovatif dalam membangkitkan kembali daya saing ekonomi. Investasi dan penanaman modal merupakan salah satu penggerak pertumbuhan pembangunan (*engine of growth of development*).

Terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian kegiatan industri tidak dapat beroperasi, dan semakin berkurangnya investasi. Oleh sebab itu perlu menjaga eksistensi kegiatan industri yang sudah ada, kemudian meningkatkan iklim yang kondusif supaya investor tertarik untuk berinvestasi ke Kabupaten Klaten.

Untuk mendukung daya saing daerah diperlukan upaya strategis pengembangan produk-produk unggulan dengan adanya fasilitas Hak Paten dan Merk Dagang, sehingga harapannya produk tersebut dapat bersaing dengan produk luar negeri.

6. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Pembangunan yang dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sesuai dengan potensi dan sumber dayanya, secara tidak langsung akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dengan adanya perencanaan, kemungkinan dampak buruk di lingkungan sekitar bisa diantisipasi terlebih dahulu, sehingga kerusakan lingkungan dapat dikurangi atau bahkan dicegah sama sekali.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026: “Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”. Selanjutnya, terdapat 6 misi pembangunan daerah dalam rangka upaya menuju pencapaian visi:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi.

3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan.
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah.
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender.
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, ditetapkan arah kebijakan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 sampai dengan 2026 untuk menjadi acuan dan penentuan prioritas pembangunan setiap tahunnya.



Sumber: BAPPEDA Klaten, 2021

Gambar 2.1

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022 – 2026

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kajian ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pribadi (2021) berjudul “Pengukuran Daya Saing Kabupaten Lampung Tengah: Metode *Location Quotient* Dan *Shift-Share Analysis*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sektor-sektor ekonomi yang menjadi kekuatan utama dalam mendorong daya saing ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik di tingkat kabupaten dan provinsi. Metode yang digunakan meliputi *Location Quotient* (LQ) serta analisis *Shift-Share*. Berdasarkan analisis LQ dan DLQ, ditemukan bahwa hanya tiga sektor yang berperan sebagai sektor basis, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Sementara itu, analisis Shift-share menunjukkan bahwa pada periode 2016–2020, hanya dua sektor yang menunjukkan pertumbuhan cepat sekaligus memiliki daya saing, yakni sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor Informasi dan Komunikasi. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah oleh para pengambil kebijakan di Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian dilakukan oleh Ferdiansyah (2022) dengan judul “Sektor Unggulan Dan Hubungannya Dengan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021”. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi unggulan dan memiliki prospek perkembangan di Kabupaten Klaten, serta menganalisis keterkaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

selama periode 2016 hingga 2021. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten dan portal data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Data sekunder tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat sembilan sektor yang tergolong unggulan dan enam sektor lainnya yang dipandang prospektif bagi pengembangan ekonomi Kabupaten Klaten ke depan. Temuan menarik dari penelitian ini adalah bahwa meskipun Kabupaten Klaten dikenal luas sebagai daerah penghasil beras, sektor pertanian ternyata tidak termasuk dalam kategori sektor unggulan maupun sektor prospektif. Selain itu, melalui hasil wawancara, diketahui bahwa sektor-sektor unggulan yang ada pada periode 2016–2021 belum menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Klaten. Penelitian ini juga menemukan adanya pertukaran dalam dinamika kebijakan pembangunan ekonomi yang mengembangkan antara sektor industri dan perdagangan dengan sektor pertanian. Secara umum, struktur ekonomi Kabupaten Klaten menunjukkan pergeseran dari sektor primer menuju sektor sekunder.

Penelitian oleh Rini (2020) berjudul “Analisis Sektor Unggulan Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sektor unggulan serta mengkaji potensi sektor-sektor ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data PDRB Provinsi Jawa Tengah dan masing-masing Kabupaten/Kota ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2016 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dan setiap Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), analisis *Shift-Share*, Metode Esteban Marquillas, dan Tipologi Klassen. Berdasarkan hasil analisis DLQ terdapat tiga sektor tertinggal yaitu Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, dan Sektor Pengadaan Air sedangkan 14 sektor lainnya menjadi sektor basis di semua daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis *Shift-Share* dan metode Esteban Marquillas sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan paling terspesialisasi adalah Sektor Jasa Pendidikan di 14 kabupaten dan 2 kota. Selanjutnya, hasil analisis Tipologi Klassen menunjukkan sektor tertinggal dan harus lebih ditingkatkan di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian.

Penelitian yang berjudul “Analisis Sektor Basis Dan Sektor Prospektif Kabupaten Nganjuk Pada Tahun 2019-2021” dilakukan oleh Hanifah (2022). Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk pada periode 2019 hingga 2021 menunjukkan pola yang tidak stabil ditunjukkan dengan kontraksi ekonomi sebesar -1,71 persen. Penurunan signifikan ini terjadi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui identifikasi sektor-sektor unggulan terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor basis dan sektor prospektif di Kabupaten Nganjuk selama kurun waktu 2019–2021. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan alat analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Berdasarkan hasil analisis LQ, ditemukan terdapat delapan sektor yang tergolong sebagai sektor basis, yaitu: sektor pertanian, pengadaan air, konstruksi,

perdagangan besar, real estat, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, dan jasa lainnya. Sementara itu, hasil dari analisis DLQ menunjukkan bahwa terdapat empat sektor yang dianggap prospektif, yakni sektor pertanian, industri pengolahan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya. Guna menjaga peran sektor pertanian sebagai basis utama di Kabupaten Nganjuk, pemerintah daerah perlu memberikan penyuluhan kepada petani dan mendorong pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas, sambil tetap memperhatikan sektor lain sebagai penunjang. Sementara, untuk industri pengolahan yang berkembang pesat di Kabupaten Nganjuk dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan sumber daya lokal, baik tenaga kerja maupun bahan baku alam, guna menekan ketergantungan pada impor.

Penelitian yang dilakukan oleh Hutapea *et al.* (2020) berjudul “Analisis Sektor Basis Dan Non Basis Serta Daya Saing Ekonomi Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor basis dan non basis serta menilai daya saing ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Penelitian bersifat kuantitatif dengan alat analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift Share*, dan Tipologi Klassen. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa terdapat 12 sektor basis di Kota Medan, termasuk sektor pengadaan air, konstruksi, perdagangan, transportasi, akomodasi, informasi, keuangan, real estate, jasa perusahaan, pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya. Sementara itu, lima sektor lainnya tergolong non basis. Berdasarkan analisis *Shift Share*, mayoritas sektor memiliki nilai *Differential Shift* positif, menandakan daya saing tinggi dibandingkan sektor sejenis di wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya, analisis Tipologi Sektor mengidentifikasi sembilan sektor sebagai sektor unggulan yang berkembang pesat.